



## **PENERAPAN SEA POWER ALFRED THAYER MAHAN DALAM MENGHADAPI ANCAMAN LAUT YURISDIKSI INDONESIA**

**Muh. Ilyansyah, Lukman Yudho Prakoso, Rudi Sutanto, Nurfaizah A. Daniela**

Strategi Pertahanan Laut, Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan, Indonesia

### **Abstrak**

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi berbagai tantangan keamanan maritim yang kompleks. Teori Sea Power Mahan, yang menekankan pentingnya kekuatan laut dalam mempengaruhi sejarah dan kebijakan suatu negara, dianalisis relevansinya dengan kondisi geopolitik dan geostrategis Indonesia saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Sea Power Mahan masih relevan untuk diterapkan dalam strategi pertahanan maritim Indonesia, namun perlu disesuaikan dengan karakteristik geografis dan ancaman kontemporer yang dihadapi. Pengembangan kekuatan angkatan laut, penguasaan titik-titik strategis, pengembangan infrastruktur maritim, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya domain maritim menjadi kunci dalam mengimplementasikan konsep Sea Power di Indonesia. Adaptasi teori Mahan yang tepat dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi ancaman di wilayah laut yurisdiksinya.

**Kata Kunci:** Keamanan Maritim, Pertahanan Maritim, Sea Power.

### **PENDAHULUAN**

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan luas wilayah mencapai 7,9 juta km<sup>2</sup> dengan 2/3 merupakan wilayah perairan, menghadapi tantangan besar dalam menjaga keamanan dan kedaulatan maritimnya. Posisi geografis yang strategis di antara dua samudera

dan dua benua tidak hanya memberi keuntungan ekonomi dan geopolitik, tetapi juga menghadirkan kompleksitas dalam pengelolaan dan pengamanan wilayah laut (Susanto & Munaf, 2015). Posisi geografis Indonesia yang berada di persimpangan dua samudera dan dua benua menjadikannya titik penting dalam jalur pelayaran internasional, sekaligus menempatkannya pada posisi

---

\*Correspondence Address : [muh.ilyansyah@sp.idu.ac.id](mailto:muh.ilyansyah@sp.idu.ac.id)  
DOI : 10.31604/jips.v11i10.2024. 3960-3974  
© 2024UM-Tapsel Press

rentan terhadap berbagai ancaman keamanan maritim. (Cribb & Ford, 2009).

Laut yurisdiksi Indonesia mencakup area yang luas, termasuk laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas laut teritorial seluas 12 mil laut dari garis pangkal, hak berdaulat di ZEE hingga 200 mil laut, dan hak eksklusif atas landas kontinen hingga batas terluar tepian kontinen. Luas total wilayah laut Indonesia diperkirakan mencapai 6,4 juta km<sup>2</sup>, menjadikannya salah satu negara dengan wilayah maritim terbesar di dunia (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2022).

Pentingnya laut yurisdiksi bagi Indonesia tidak bisa dilebih-lebihkan. Dari segi ekonomi, laut Indonesia kaya akan sumber daya alam, termasuk cadangan minyak dan gas, mineral, dan perikanan. Sektor kelautan dan perikanan berkontribusi signifikan terhadap PDB nasional dan menyediakan lapangan kerja bagi jutaan penduduk Indonesia. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, potensi ekonomi sektor kelautan Indonesia diperkirakan mencapai 1,33 triliun dolar AS per tahun (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2022).

Dari perspektif keamanan dan pertahanan, laut yurisdiksi Indonesia memiliki peran vital. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi berbagai ancaman maritim seperti illegal fishing, penyelundupan, dan pelanggaran kedaulatan. Kemampuan untuk mengamankan dan mengontrol wilayah laut yang luas ini menjadi kunci bagi kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia. Hal ini juga penting untuk menjaga stabilitas regional, mengingat posisi strategis Indonesia di jalur pelayaran internasional (Ilyansyah & Prakoso, 2023).

Selain aspek ekonomi dan keamanan, laut yurisdiksi Indonesia juga memiliki peran penting dalam konteks lingkungan dan keanekaragaman hayati. Indonesia dikenal sebagai bagian dari Coral Triangle, wilayah dengan keanekaragaman terumbu karang dan kehidupan laut tertinggi di dunia. Menurut studi yang dilakukan oleh World Resources Institute, perairan Indonesia memiliki lebih dari 500 spesies terumbu karang dan lebih dari 3.000 spesies ikan. Pelestarian ekosistem laut ini tidak hanya penting untuk keseimbangan lingkungan global, tetapi juga untuk mendukung ekonomi lokal dan ketahanan pangan nasional (Veron et al., 2009).

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengelola laut yurisdiksinya juga mencakup aspek teknologi dan sumber daya manusia. Pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut yang luas membutuhkan teknologi canggih seperti sistem pemantauan berbasis satelit dan armada kapal patroli yang memadai. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia di bidang maritim, termasuk pelaut, peneliti kelautan, dan tenaga ahli manajemen pesisir, menjadi krusial untuk mendukung pengelolaan laut yang efektif.

Posisi Indonesia di antara dua samudera dan dua benua menjadikannya negara poros (pivotal state) dalam dinamika kawasan Indo-Pasifik. Kemampuan Indonesia untuk mengelola laut yurisdiksinya dengan baik akan mempengaruhi stabilitas dan keamanan regional. Hal ini menjadi semakin penting mengingat meningkatnya persaingan antara kekuatan besar di kawasan dan potensi konflik di Laut China Selatan (Anwar D.F., 2015).

Indonesia terus berupaya untuk memperkuat klaim dan pengelolaannya atas wilayah laut. Ini termasuk upaya untuk menetapkan batas landas

kontinen di luar 200 mil laut dan menyelesaikan perbatasan maritim dengan negara-negara tetangga. Proses ini melibatkan negosiasi bilateral dan multilateral yang kompleks, serta pengajuan klaim ke United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf (Arsana, 2014).

Dengan kompleksitas dan pentingnya laut yurisdiksi bagi Indonesia, pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan menjadi prioritas nasional yang krusial. Ini membutuhkan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan, serta kerjasama internasional yang kuat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep teoritis dan aplikasinya dalam konteks spesifik (Creswell & Creswell, 2017).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur yang komprehensif, meliputi sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup karya-karya asli AT Mahan, dokumen kebijakan pemerintah Indonesia terkait strategi maritim, serta laporan-laporan resmi dari institusi terkait seperti Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Laut, dan Bakamla (Badan Keamanan Laut). Sumber sekunder meliputi buku-buku akademik, artikel jurnal, laporan penelitian, dan publikasi think tank yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, peneliti melakukan coding terhadap literatur yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan elemen-elemen Sea Power Mahan dan aplikasinya dalam

konteks Indonesia. Kedua, dilakukan analisis komparatif untuk membandingkan interpretasi konsep Mahan dalam berbagai sumber dan konteks. Ketiga, peneliti melakukan analisis historis untuk melihat evolusi penerapan prinsip-prinsip Mahan dalam kebijakan maritim Indonesia dari waktu ke waktu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam menghadapi kompleksitas ancaman di wilayah laut yurisdiksinya, Indonesia perlu memiliki strategi maritim yang komprehensif dan efektif. Salah satu konsep yang telah lama menjadi acuan dalam pemikiran strategi maritim adalah teori Sea Power yang dikemukakan oleh Alfred Thayer Mahan, seorang ahli strategi angkatan laut Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Meskipun dikembangkan lebih dari satu abad yang lalu, pemikiran Mahan tetap relevan dan banyak diadopsi oleh negara-negara maritim di seluruh dunia (Till, 2013).

Bagi Indonesia, yang memiliki wilayah laut yang luas dan strategis, pemikiran Mahan ini menawarkan perspektif yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut. Terlebih lagi, dengan meningkatnya ancaman keamanan maritim seperti pembajakan, penyelundupan, perikanan ilegal, dan potensi konflik teritorial dengan negara tetangga, Indonesia perlu mengembangkan strategi komprehensif dalam menjaga kepentingan nasionalnya di laut (Keliat, 2009).

### **1. Teori Sea Power Mahan**

Alfred Thayer Mahan, dalam karyanya yang monumental "The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783", mengemukakan bahwa kekuatan laut adalah faktor penentu dalam keunggulan suatu bangsa. Mahan berpendapat bahwa negara yang mampu menguasai lautan akan memiliki keunggulan strategis dalam persaingan

global (Mahan, 1890). Teori ini didasarkan pada analisis historis tentang bagaimana kekuatan maritim telah mempengaruhi perjalanan sejarah dan perkembangan negara-negara besar.

Mahan berpendapat bahwa kekuatan laut adalah faktor kunci dalam menentukan kekuatan dan kemakmuran suatu bangsa (Mahan, 1890). Teorinya menekankan pentingnya kontrol atas laut sebagai sarana untuk memproyeksikan kekuatan, melindungi jalur perdagangan, dan menjamin keamanan nasional.

Mahan mengidentifikasi enam elemen utama yang mempengaruhi kekuatan laut suatu negara yaitu posisi geografis, konfigurasi fisik, luas wilayah, jumlah penduduk, karakter nasional, dan sifat pemerintahan (Mahan, 1890). Pemikiran Mahan ini telah mempengaruhi kebijakan maritim banyak negara, termasuk dalam pengembangan angkatan laut dan strategi pertahanan maritim di Indonesia.

Bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, pemikiran Mahan ini memiliki relevansi yang signifikan. Dengan 2/3 wilayahnya berupa perairan dan posisi strategis di persimpangan jalur perdagangan internasional, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan kekuatan maritimnya (Cribb & Ford, 2009). Namun, tantangan muncul dalam hal bentuk fisik wilayah yang terdiri dari ribuan pulau, yang mempersulit pengawasan dan pertahanan (Anwar, 2018).

#### a. Posisi Geografis

Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis, berada di persimpangan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, serta antara Benua Asia dan Australia. Posisi ini memberikan Indonesia kontrol atas jalur pelayaran vital, termasuk Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Menurut

Laksamana TNI (Purn) Marsetio (2014), posisi strategis ini menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sekaligus menghadapkannya pada tantangan keamanan yang kompleks.

Geografi memainkan peran penting dalam teori Mahan. Dalam berbagai tulisannya, ia menekankan bahwa posisi geografis suatu negara sangat mempengaruhi potensi kekuatan lautnya. Negara dengan akses ke laut terbuka dan garis pantai yang menguntungkan dianggap memiliki keunggulan alami dalam pengembangan kekuatan maritim. Hal ini dibahas secara mendalam dalam karyanya "The Problem of Asia and Its Effect Upon International Policies" (1900), di mana ia menganalisis implikasi geografi terhadap strategi maritim di kawasan Asia (Mahan, 1900).

#### b. Konfigurasi Fisik

Konfigurasi fisik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau memberikan tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, banyaknya pulau dan panjangnya garis pantai menyulitkan pengawasan dan pertahanan. Di sisi lain, konfigurasi ini juga memberikan Indonesia keuntungan strategis dalam hal kedalaman pertahanan dan potensi ekonomi maritim yang besar.

#### c. Luas Wilayah

Dengan luas perairan mencapai sekitar 6,4 juta km<sup>2</sup>, Indonesia memiliki wilayah maritim yang sangat luas. Mahan menekankan pentingnya luas wilayah dalam membangun kekuatan laut, dan hal ini sangat relevan bagi Indonesia. Namun, luasnya wilayah juga berarti tantangan besar dalam pengawasan dan penegakan hukum di laut.

Luasnya wilayah laut Indonesia memerlukan pendekatan yang terintegrasi, melibatkan tidak hanya TNI AL, tetapi juga berbagai instansi

pemerintah lainnya seperti Bakamla, KKP, dan Bea Cukai. Ini sejalan dengan pemikiran Mahan tentang pentingnya koordinasi antara kekuatan militer dan sipil dalam membangun kekuatan maritim.

d. Jumlah Penduduk

Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, memiliki potensi besar dalam membangun kekuatan maritim seperti yang diidealkan Mahan. Namun, tantangannya adalah bagaimana mengubah potensi demografis ini menjadi kekuatan maritim yang efektif. Indonesia perlu meningkatkan kesadaran maritim di kalangan penduduknya dan mengembangkan sumber daya manusia yang berorientasi pada kelautan. Ini termasuk investasi dalam pendidikan maritim, pengembangan industri pelayaran, dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

e. Karakter Nasional

Mahan menekankan pentingnya karakter nasional yang berorientasi pada laut dalam membangun kekuatan maritim. Dalam konteks Indonesia, meskipun secara geografis adalah negara maritim, secara historis orientasi pembangunannya lebih banyak ke darat. Presiden Joko Widodo, melalui visi Poros Maritim Dunia, berupaya mengubah paradigma ini dengan mendorong pembangunan yang berorientasi maritim (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 2017). Ini dapat dilihat sebagai upaya untuk membentuk karakter nasional yang lebih sejalan dengan pemikiran Mahan tentang bangsa maritim.

Mahan juga menekankan pentingnya karakter nasional dalam membangun kekuatan laut. Ia berpendapat bahwa orientasi maritim dalam kebijakan dan budaya nasional, serta dukungan publik untuk pengembangan kekuatan laut, sangat

penting bagi keberhasilan sebuah negara maritim.

f. Sifat Pemerintahan

Mahan menekankan pentingnya pemerintahan yang stabil dan mendukung pengembangan kekuatan laut. Dalam konteks Indonesia modern, ini dapat diinterpretasikan sebagai kebutuhan akan kebijakan yang konsisten dan dukungan politik yang kuat untuk pembangunan maritim.

Mahan meyakini bahwa inti dari kekuatan laut adalah armada tempur yang kuat, dengan fokus pada kapal perang besar sebagai tulang punggung angkatan laut. Dalam bukunya "The Interest of America in Sea Power, Present and Future" (1897), ia menekankan pentingnya membangun dan memelihara armada yang mampu menghadapi ancaman dari negara lain. Selain itu, Mahan juga menekankan pentingnya memiliki jaringan pangkalan angkatan laut di lokasi strategis untuk mendukung operasi jarak jauh dan mempertahankan kehadiran global (Mahan, 1897).

Teori Mahan juga menekankan hubungan erat antara kekuatan laut dan kemakmuran ekonomi. Dalam "Naval Strategy: Compared and Contrasted with the Principles and Practice of Military Operations on Land" (1911), ia berargumen bahwa perlindungan jalur perdagangan laut harus menjadi prioritas utama bagi negara maritim. Mahan melihat perdagangan maritim sebagai sumber kekayaan nasional dan dasar untuk membangun dan mempertahankan kekuatan angkatan laut (Mahan, 1911).

Mahan mempromosikan prinsip konsentrasi kekuatan dalam strategi angkatan laut. Mahan berpendapat bahwa membagi kekuatan secara berlebihan dapat melemahkan efektivitas angkatan laut secara keseluruhan. Ia mendorong para komandan untuk menghindari pembagian kekuatan yang tidak perlu

dan fokus pada pencapaian dominasi di area-area kunci (Mahan, 1911).

Konsep pertempuran laut yang menentukan (*decisive battle*) juga menjadi salah satu prinsip utama dalam pemikiran Mahan. Dalam "The Influence of Sea Power Upon History" (1890), ia menekankan pentingnya pertempuran besar antara armada utama sebagai cara untuk mencapai kemenangan decisif di laut. Mahan percaya bahwa hasil dari pertempuran semacam ini dapat menentukan kontrol atas laut untuk jangka waktu yang lama, sehingga memberikan keunggulan strategis yang signifikan (Mahan, 1890).

Proyeksi kekuatan merupakan aspek penting lainnya dari teori Mahan. Ia menekankan kemampuan kekuatan laut untuk mempengaruhi peristiwa di darat. Mahan mendukung pengembangan kapabilitas operasi amfibi dan kemampuan untuk melakukan intervensi di wilayah pesisir. Pemikiran ini diuraikan lebih lanjut dalam karyanya "The Influence of Sea Power upon the French Revolution and Empire, 1793-1812" (1892), di mana ia menganalisis bagaimana kekuatan laut dapat mempengaruhi konflik di daratan (Mahan, 1892).

Kesinambungan kebijakan maritim menjadi prinsip penting terakhir dalam teori Mahan. Ia menekankan pentingnya kebijakan maritim jangka panjang dan konsisten, serta investasi berkelanjutan dalam kekuatan laut. Mahan berargumen bahwa pengembangan kekuatan laut membutuhkan komitmen nasional yang berkelanjutan dan tidak bisa dicapai dalam waktu singkat. Ia mendorong para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari keputusan maritim mereka (Mahan, 1910).

Meskipun teori Mahan dikembangkan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, banyak aspeknya

masih relevan dalam strategi maritim modern. Namun, aplikasinya telah mengalami adaptasi untuk mengakomodasi perubahan teknologi, geopolitik, dan karakteristik perang modern. Para ahli strategi kontemporer seperti Geoffrey Till dalam karyanya "Seapower: A Guide for the Twenty-First Century" (2013) telah mereinterpretasi prinsip-prinsip Mahan dalam konteks keamanan maritim modern, menunjukkan daya tahan dan fleksibilitas pemikiran Mahan (Till, 2013).

## **2. Tantangan dan Ancaman Maritim Kontemporer Indonesia**

Indonesia menghadapi berbagai ancaman keamanan maritim yang kompleks dan multidimensi. Salah satu ancaman utama adalah *illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing*, yang menyebabkan kerugian ekonomi signifikan bagi negara. Menurut laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kerugian akibat IUU fishing diperkirakan mencapai 23 miliar dolar AS per tahun (KKP, 2019). Ancaman ini tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga berpotensi mengancam keberlanjutan sumber daya laut dan kedaulatan wilayah.

Selain itu, Indonesia juga menghadapi ancaman dari aktivitas transnasional ilegal seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan pembajakan. Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan bahwa sebagian besar narkoba yang beredar di Indonesia 80% masuk melalui jalur laut, memanfaatkan kelemahan pengawasan di wilayah perairan yang luas (BNN, 2020). Situasi ini menunjukkan bahwa penguasaan laut, sebagaimana ditekankan oleh Mahan, menjadi krusial dalam menjaga keamanan nasional.

Ancaman lain yang tidak kalah pentingnya adalah potensi konflik

teritorial dengan negara-negara tetangga. Sengketa di Laut China Selatan, misalnya, memiliki implikasi langsung terhadap keamanan dan kedaulatan Indonesia di perairan Natuna (Connelly, 2016). Dalam konteks ini, kemampuan Indonesia untuk memproyeksikan kekuatan maritimnya menjadi faktor penting dalam melindungi kepentingan nasionalnya.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia tidak hanya diberikan keuntungan semata, tetapi juga terdapat tantangan yang kompleks yang perlu diatasi dengan komprehensif demi kepentingan nasional negaranya, diantaranya:

a. Tantangan Geografis dan Infrastruktur

Karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan memberikan tantangan unik dalam penerapan konsep Mahan. Berbeda dengan negara-negara kontinental yang menjadi fokus analisis Mahan, Indonesia harus mengamankan tidak hanya garis pantai, tetapi juga ribuan pulau dan perairan antar pulau, hal ini memerlukan pendekatan yang lebih kompleks dalam pengembangan infrastruktur pertahanan dan pengawasan maritim.

Tantangan infrastruktur juga signifikan. Indonesia masih menghadapi kesenjangan dalam hal fasilitas pelabuhan, galangan kapal, dan infrastruktur pendukung lainnya yang diperlukan untuk memproyeksikan kekuatan maritim secara efektif. Menurut laporan World Bank (2018), Indonesia memerlukan investasi besar dalam infrastruktur maritim untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik antar pulau.

b. Tantangan Ekonomi dan Anggaran

Membangun kekuatan maritim seperti yang diidealkan Mahan membutuhkan investasi besar dalam angkatan laut dan infrastruktur

pendukung. Bagi Indonesia, ini merupakan tantangan mengingat kebutuhan anggaran yang besar di sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan.

Indonesia perlu mencari keseimbangan antara pembangunan kekuatan maritim dan prioritas pembangunan lainnya. Ini mungkin memerlukan pendekatan bertahap dan fokus pada pengembangan kapabilitas kunci yang paling relevan dengan kebutuhan keamanan Indonesia.

c. Tantangan Teknologi dan Modernisasi

Mahan menekankan pentingnya teknologi dalam membangun kekuatan laut. Bagi Indonesia, mengikuti perkembangan teknologi maritim terkini merupakan tantangan besar. Indonesia masih tertinggal dalam hal teknologi pengawasan maritim, sistem pertahanan pesisir, dan kapal perang modern.

Modernisasi angkatan laut Indonesia memerlukan tidak hanya akuisisi peralatan baru, tetapi juga pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Hal ini sejalan dengan pemikiran Mahan tentang pentingnya kemandirian industri maritim. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Schreer (2013), Indonesia menghadapi dilema antara kebutuhan modernisasi cepat dan keinginan untuk mengembangkan kapasitas industri pertahanan domestik.

d. Tantangan Sumber Daya Manusia

Membangun kekuatan maritim yang efektif memerlukan sumber daya manusia yang terampil dan berorientasi pada kelautan. Meskipun Indonesia memiliki populasi besar, masih ada kesenjangan dalam hal tenaga terampil di sektor maritim. Menurut laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan (2020), Indonesia masih kekurangan tenaga ahli di berbagai bidang maritim, mulai dari teknik perkapalan hingga manajemen pelabuhan.

### **3. Penerapan Prinsip Sea Power dalam Strategi Maritim Indonesia**

Untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut, Indonesia perlu mengadaptasi prinsip-prinsip Sea Power Mahan ke dalam strategi maritim nasionalnya. Salah satu aspek kunci adalah pengembangan kekuatan angkatan laut yang capable dan credible. Mahan menekankan pentingnya armada laut yang kuat sebagai instrumen utama dalam memproyeksikan kekuatan di laut (Mahan, 1911). Dalam konteks Indonesia, ini berarti investasi yang signifikan dalam modernisasi dan penguatan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL).

Program Minimum Essential Force (MEF) yang dicanangkan pemerintah Indonesia merupakan langkah positif dalam arah ini. MEF bertujuan untuk membangun kekuatan pertahanan yang mampu menangani ancaman aktual dengan meningkatkan kapabilitas alutsista dan personel TNI (Kementerian Pertahanan RI, 2015). Namun, implementasi program ini perlu dipercepat dan diperluas untuk mencapai tingkat kekuatan yang dibutuhkan dalam mengamankan wilayah maritim yang luas.

Selain itu, penerapan Sea Power juga melibatkan pengembangan infrastruktur maritim yang komprehensif. Mahan menekankan pentingnya pelabuhan dan basis angkatan laut sebagai elemen penting dalam strategi maritim (Mahan, 1890). Untuk Indonesia, ini berarti tidak hanya membangun dan memperkuat pelabuhan-pelabuhan strategis, tetapi juga mengembangkan industri galangan kapal, sistem pengawasan laut, dan fasilitas pendukung lainnya. Program Tol Laut yang diinisiasi pemerintah Indonesia merupakan langkah yang sejalan dengan pemikiran ini, bertujuan

untuk meningkatkan konektivitas maritim dan mendukung pertumbuhan ekonomi (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2019).

a. Modernisasi dan penguatan Angkatan Laut Indonesia

TNI Angkatan Laut telah mengadopsi doktrin yang mencerminkan prinsip-prinsip Mahan, meskipun dengan adaptasi terhadap kondisi geografis Indonesia. Doktrin Eka Sasana Jaya, yang diadopsi pada tahun 2004, menekankan pentingnya penguasaan laut (sea control) dan proyeksi kekuatan, sejalan dengan pemikiran Mahan. Namun, doktrin ini juga memasukkan elemen-elemen pertahanan kepulauan yang mencerminkan karakteristik unik Indonesia.

Doktrin Eka Sasana Jaya, yang berarti "Satu Tujuan Kemenangan", adalah doktrin resmi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang ditetapkan pada tahun 2001. Doktrin ini menggambarkan visi dan misi TNI AL dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia dan mengamankan kepentingan nasional di laut. Eka Sasana Jaya menekankan pentingnya kekuatan laut yang terintegrasi dan kemampuan untuk melakukan operasi di seluruh spektrum konflik, dari operasi damai hingga perang skala penuh.

Doktrin ini didasarkan pada konsep pertahanan laut nusantara, yang mengakui karakteristik unik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Eka Sasana Jaya menekankan pentingnya kontrol atas chokepoint strategis, perlindungan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan kemampuan untuk memproyeksikan kekuatan di seluruh perairan nasional. Doktrin ini juga mencerminkan kebutuhan Indonesia untuk menghadapi berbagai ancaman maritim, termasuk pembajakan,

penyelundupan, dan illegal fishing (Sebastian, Supriyanto, & Arsana, 2015).

Implementasi Doktrin Eka Sasana Jaya melibatkan pengembangan kapabilitas angkatan laut dalam tiga dimensi: permukaan, bawah air, dan udara. Ini termasuk modernisasi armada kapal perang, pengembangan kekuatan kapal selam, dan peningkatan kemampuan patroli udara maritim. Doktrin ini juga menekankan pentingnya interoperabilitas dengan angkatan bersenjata lainnya dan kerjasama dengan instansi penegak hukum maritim.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, program Minimum Essential Force (MEF) yang dicanangkan pemerintah Indonesia merupakan langkah positif dalam arah ini. MEF bertujuan untuk membangun kekuatan pertahanan yang mampu menangani ancaman aktual dengan meningkatkan kapabilitas alutsista dan personel TNI (Kementerian Pertahanan RI, 2015).

Upaya Indonesia untuk membangun "green-water navy" yang mampu beroperasi di perairan regional mencerminkan adaptasi terhadap konsep Mahan tentang kekuatan laut. Program Minimum Essential Force (MEF) TNI AL bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas proyeksi kekuatan maritim Indonesia, meskipun masih terbatas oleh kendala anggaran dan teknologi.

Mahan menekankan pentingnya angkatan laut yang kuat sebagai inti dari Sea Power. Dalam konteks Indonesia, hal ini dapat diterjemahkan menjadi upaya modernisasi dan penguatan TNI Angkatan Laut. Rencana Strategis TNI AL 2020-2024 mencakup program pengadaan kapal perang baru dan peningkatan kemampuan surveillance maritim (TNI AL, 2020). Namun, tantangan utama adalah anggaran pertahanan yang terbatas. Saat ini, anggaran pertahanan Indonesia hanya sekitar 0,8% dari PDB, jauh di bawah

rekomendasi Mahan yang menekankan investasi besar dalam kekuatan laut (World Bank, 2021).

#### b. Pengembangan industri maritim nasional

Upaya Indonesia untuk mengembangkan industri galangan kapal dan industri pendukung maritim lainnya mencerminkan pemahaman terhadap konsep Mahan tentang pentingnya basis industri maritim yang kuat. Program pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis maritim, seperti di Bitung dan Sorong, merupakan langkah konkret dalam hal ini.

Salah satu aspek penting dari Sea Power yang ditekankan Mahan adalah kemampuan suatu negara untuk membangun dan memelihara armada lautnya sendiri (Mahan, 1911). Dalam konteks Indonesia modern, ini berarti pengembangan industri pertahanan maritim nasional yang kuat. Indonesia telah mulai mengambil langkah-langkah signifikan dalam hal ini, misalnya melalui pengembangan PT PAL Indonesia sebagai galangan kapal utama untuk produksi kapal perang dan kapal selam.

Pengembangan industri galangan kapal nasional yang kuat dan mandiri menjadi sangat penting. Industri ini tidak hanya mendukung kebutuhan pertahanan, tetapi juga berperan penting dalam pengembangan ekonomi maritim secara keseluruhan.

Kemajuan teknologi yang signifikan menambah lanskap ancaman salah satunya siber. Keamanan siber telah menjadi komponen penting dari Sea Power modern. Sistem navigasi, komunikasi, dan kontrol di kapal-kapal modern sangat bergantung pada teknologi digital, yang membuatnya rentan terhadap serangan siber. Untuk Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan lalu lintas maritim yang padat, keamanan siber maritim menjadi sangat penting (Bueger & Edmunds, 2017).

c. Investasi dalam teknologi pengawasan dan penegakan hukum di laut

Di era modern, Indonesia perlu berinvestasi dalam teknologi maritim canggih untuk meningkatkan kemampuan pengawasan, deteksi, dan respons terhadap ancaman. Pengembangan dan penggunaan teknologi seperti drone maritim, satelit pengawas, dan sistem informasi maritim terintegrasi menjadi semakin penting untuk menjaga kedaulatan dan keamanan maritim. Indonesia, dengan wilayah laut yang luas, membutuhkan sistem pengawasan yang efektif untuk mendeteksi dan merespons berbagai ancaman maritim (Bueger & Edmunds, 2017).

Pemerintah Indonesia telah mulai mengembangkan berbagai sistem pengawasan maritim informasi kelautan, seperti Sistem Informasi Nelayan Pintar (SINP) dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021), penggunaan satelit LAPAN-A2/LAPAN-ORARI untuk pemantauan maritim. Vessel Monitoring System (VMS) untuk kapal perikanan dan Integrated Maritime Surveillance System (IMSS).

Pengembangan sistem pengawasan maritim yang mengintegrasikan data dari berbagai sensor (termasuk satelit, radar pantai, dan drone), penerapan teknologi kecerdasan buatan untuk analisis data, serta peningkatan kerjasama antar lembaga dalam sharing informasi dapat meningkatkan efektivitas pengawasan maritim Indonesia.

Sistem Informasi Kelautan Terpadu (SIKT) yang menggabungkan data oseanografi, meteorologi, biologi laut, dan aktivitas manusia di laut menjadi sangat penting untuk pengambilan keputusan yang efektif

dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan.

Mahan menekankan pentingnya informasi dalam strategi maritim, (Mahan, 1911). pengembangan sistem informasi dan intelijen maritim yang terintegrasi menjadi sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan respons cepat terhadap ancaman. Seperti halnya dalam penggunaan Maritime Information Center (IMIC) yang bertujuan untuk mengintegrasikan data dari berbagai lembaga (Bakamla, 2020)

Mahan menekankan pentingnya kontrol atas jalur-jalur komunikasi maritim (sea lines of communication atau SLOC) sebagai bagian integral dari Sea Power (Mahan, 1911). Penguatan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai coast guard Indonesia juga merupakan langkah penting dalam meningkatkan kemampuan penegakan hukum di laut. Namun, masih diperlukan koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga yang memiliki kewenangan di laut, termasuk TNI AL, Polisi Air, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Connelly, 2015).

Penerapan konsep Maritime Domain Awareness (MDA) yang komprehensif, peningkatan kemampuan intelijen maritim, serta pengembangan prosedur operasi standar untuk penanganan berbagai jenis kejahatan maritim dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah maritim Indonesia (Bueger & Edmunds, 2017).

d. Pembangunan Infrastruktur strategis

Kebijakan Poros Maritim Dunia yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 mencerminkan upaya untuk mengimplementasikan visi Mahan tentang negara maritim yang kuat. Program pembangunan tol laut dan modernisasi pelabuhan sejalan dengan pemikiran Mahan tentang pentingnya

infrastruktur maritim. Indonesia, sebagai negara kepulauan, sangat bergantung pada transportasi laut untuk konektivitas antar pulau dan perdagangan internasional.

Mahan menekankan pentingnya jalur perdagangan maritim dalam Sea Power (Mahan, 1890). Sistem logistik yang baik tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan nasional dan proyeksi kekuatan maritim.

Mahan juga menyoroti pentingnya kontrol atas titik-titik strategis di laut sebagai bagian dari Sea Power (Mahan, 1890). Pengembangan sistem pertahanan yang kuat di pulau-pulau strategis, terutama yang berada di wilayah perbatasan. Pulau-pulau seperti Natuna, Biak, dan Saumlaki memiliki peran krusial dalam menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia di wilayah maritim.

#### e. Diplomasi Maritim

Indonesia semakin aktif dalam forum-forum maritim internasional, mencerminkan adaptasi terhadap pemikiran Mahan tentang proyeksi kekuatan. Inisiatif seperti Indian Ocean Rim Association (IORA) Concord, yang diprakarsai Indonesia pada tahun 2017, menunjukkan upaya untuk memainkan peran lebih besar dalam tata kelola maritim regional.

Meskipun Mahan lebih menekankan pada aspek kekuatan militer, dalam konteks modern, penerapan Sea Power juga melibatkan aspek diplomasi dan kerjasama internasional. Indonesia perlu memperkuat posisinya dalam forum-forum maritim regional dan internasional untuk melindungi kepentingannya (Keliat, 2009).

Salah satu contoh upaya ini adalah peran aktif Indonesia dalam ASEAN Maritime Forum (AMF) dan Expanded ASEAN Maritime Forum (EAMF), yang bertujuan untuk

meningkatkan kerjasama maritim di kawasan (Weatherbee, 2015). Melalui forum-forum ini, Indonesia dapat mempromosikan visi maritimnya dan membangun koalisi untuk menghadapi ancaman bersama.

#### f. Penguatan Ekonomi dan Budaya Maritim

Konsep Mahan tentang kekuatan laut tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi biru, termasuk perikanan, pariwisata bahari, dan energi laut terbarukan. Ekonomi biru dapat menjadi pendorong utama dalam membangun kekuatan maritim Indonesia secara komprehensif.

Ekonomi biru menekankan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pelestarian lingkungan. Penerapan konsep blue economy dapat menjadi kerangka kerja yang efektif dalam konteks ini sambil tetap melindungi ekosistem laut.

Mahan menekankan pentingnya sumber daya alam sebagai komponen dari Sea Power, terutama dalam konteks perdagangan dan ekonomi maritim (Mahan, 1890). Pengelolaan sumber daya alam maritim yang berkelanjutan menjadi krusial tidak hanya untuk mendukung ekonomi, tetapi juga untuk menjaga kedaulatan dan keamanan maritim. Indonesia memiliki kekayaan laut yang luar biasa, termasuk cadangan minyak dan gas bumi, mineral laut dalam, dan keanekaragaman hayati laut yang tinggi. Namun, eksploitasi berlebihan dan praktik tidak berkelanjutan telah mengancam keberlanjutan sumber daya ini.

Indonesia telah mengadopsi kebijakan yang lebih agresif dalam melindungi sumber daya maritimnya, termasuk pemberantasan illegal fishing. Kebijakan "sink the vessels" yang

diterapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (2014-2019) dapat dilihat sebagai implementasi modern dari konsep Mahan tentang perlindungan kepentingan maritim nasional (Connelly, 2017).

## **SIMPULAN**

Penerapan konsep Sea Power AT Mahan dalam konteks Indonesia memerlukan adaptasi yang signifikan mengingat karakteristik unik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Meskipun prinsip-prinsip dasar Mahan tentang pentingnya kekuatan maritim tetap relevan, implementasinya di Indonesia harus mempertimbangkan realitas geografis, ekonomi, dan strategis yang spesifik.

Indonesia telah menunjukkan upaya untuk mengadopsi elemen-elemen kunci dari pemikiran Mahan, seperti terlihat dalam pengembangan doktrin pertahanan maritim, upaya modernisasi angkatan laut, dan kebijakan Poros Maritim Dunia. Namun, masih terdapat tantangan signifikan dalam hal kapabilitas, koordinasi, teknologi, dan kesadaran maritim.

Untuk menghadapi ancaman laut di wilayah yurisdiksinya secara efektif, Indonesia perlu melanjutkan adaptasi prinsip-prinsip Mahan dengan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi. Ini mencakup tidak hanya penguatan kapabilitas militer, tetapi juga pengembangan ekonomi maritim, peningkatan kesadaran publik, dan penguatan diplomasi maritim.

Implementasi strategi Sea Power yang efektif bagi Indonesia memerlukan komitmen jangka panjang, investasi yang berkelanjutan, dan koordinasi yang erat antar berbagai pemangku kepentingan. Adaptasi konsep Mahan dalam konteks Indonesia modern harus mempertimbangkan spektrum ancaman yang lebih luas, termasuk ancaman non-

tradisional seperti pembajakan, illegal fishing, dan perubahan iklim.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan maritim yang signifikan di kawasan. Posisi geografis yang strategis, sumber daya alam yang melimpah, dan populasi yang besar merupakan modal dasar yang sejalan dengan elemen-elemen Sea Power Mahan. Namun, untuk mewujudkan potensi ini, diperlukan strategi yang komprehensif dan konsisten yang menggabungkan kekuatan militer, diplomasi, ekonomi, dan sosial-budaya.

Dalam menghadapi dinamika geopolitik regional yang semakin kompleks, penerapan prinsip-prinsip Mahan perlu disertai dengan fleksibilitas dan inovasi. Indonesia harus mampu memainkan peran sebagai penyeimbang dan fasilitator kerja sama maritim regional, sambil tetap menjaga kepentingan nasionalnya.

Akhirnya, keberhasilan Indonesia dalam mengadaptasi dan mengimplementasikan konsep Sea Power Mahan akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk membangun konsensus nasional tentang pentingnya orientasi maritim. Ini memerlukan perubahan paradigma dari nation-state menjadi ocean-state, di mana laut tidak lagi dilihat sebagai pemisah, melainkan sebagai penghubung dan sumber kemakmuran nasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Anwar, D.F. (2020). Indonesia and the ASEAN outlook on the Indo-Pacific. *International Affairs*, 96(1), 111-129.

Arsana, I. (2014). Challenges and opportunities in the delimitation of Indonesia's maritime boundaries: a legal and technical approach.

Bakamla RI. (2019). RESNSTA Bakamla RI 2020-2024. Jakarta: Bakamla RI.

BNN. 2024. BNN RI Ajak Lintas Agama Perang Melawan Narkotika 10 Juni 2023. dalam <https://bnn.go.id/bnn-ri-ajak-lintas-agama-perang-melawan-narkotika/>

Bueger, C., & Edmunds, T. (2017). Beyond seablindness: a new agenda for maritime security studies. *International affairs*, 93(6), 1293-1311.

Chapsos, I., & Malcolm, J. A. (2017). Maritime security in Indonesia: Towards a comprehensive agenda?. *Marine Policy*, 76, 178-184.

Connelly, A. (2016). Indonesia in the South China Sea: going it alone.

Connelly, A.L. (2015). Sovereignty and the sea: President Joko Widodo's foreign policy challenges. *Contemporary Southeast Asia*, 1-28.

Cordner, L., Cordner, L., & Roughley. (2017). *Maritime security risks, Vulnerabilities and cooperation*. palgrave macmillan.

Cribb, R. B., & Ford, M. (Eds.). (2009). *Indonesia beyond the water's edge: managing an archipelagic state*. Institute of Southeast Asian Studies.

Darajati, M.R. (2023). Ekonomi Biru: Peluang Implementasi Regulasi Di Indonesia. *TheJournalish: Social and Government*, 4(5), 41-53.

Febrica, S. (2017). *Maritime security and Indonesia: Cooperation, interests and strategies*. Routledge.

FORCES, I.A. TRANSFORMING THE INDONESIAN ARMED FORCES. [https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2014/07/ER111125\\_Transforming\\_Indon\\_Armed\\_Forces.pdf](https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2014/07/ER111125_Transforming_Indon_Armed_Forces.pdf) diakses Juli 2024

Gindarsah, I. (2015). Indonesia and the South China Sea: A two-fold strategy. *Rajaratnam School of International Studies Commentary*, 158, 1-3.

Hardianto, M.K.B. (2021). Evolusi doktrin pertahanan indonesia sebagai negara maritim. *Jurnal Noken Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(1), 1-13.

Hidayat, S. (2015). *Doktrin Pertahanan Dalam Mewujudkan Keamanan Maritim*:

*Perspektif Posmodernisme*. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 5(2), 71-92.

Indrawan, J. (2015). Perubahan paradigma pertahanan Indonesia dari pertahanan teritorial menjadi pertahanan maritim: sebuah usulan. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 5(2), 93-114.

Keliat, M. (2009). Keamanan maritim dan implikasi kebijakannya bagi Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13(1), 111-129.

Kemenkopolkham. (2019). *Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara 2020-2024*.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 2022. *Kelautan dan Perikanan Dalam Angka Tahun 2022*. Pusat Data, Statistik dan Informasi Vol 1, 2022

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. (2018). *Kelautan dan Perikanan dalam Angka*. Jakarta: KKP RI.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. (2018). *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: KKP RI.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. (2020). *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: KKP RI.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. (2020). *Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2021-2025*. Jakarta: Kemenko Maritim.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2020). *Program Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: Kemendikbud RI.

Kementerian Perhubungan RI. (2019). *Laporan Kinerja Kementerian Perhubungan 2019*. Jakarta: Kemenhub RI.

Kementerian Pertahanan RI. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. Jakarta: Kemhan RI.

Laksmana, E. (2017). Indonesian Sea Policy: Accelerating Jokowi's Global Maritime Fulcrum?. *Asia Maritime Transparency Initiative*, 23.

Laksmana, E. A. (2017). *Pragmatic Equidistance. China, The United States, and the*

Future of Southeast Asia: US-China Relations, Volume II, 2, 113.

Lemhanas. 2024. Kepala BNN: Penyelundupan Narkoba 80% Lewat Jalur Laut Juli 2023. dalam <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/734-kepala-bnn-penyelundupan-narkoba-80-lewat-jalur-laut> diakses Juli 2024

Lucas, E.R., Rivera-Paez, S., & Crosbie, T. (Eds.). (2020). *Maritime security: Counter-terrorism lessons from maritime piracy and Narcotics Interdiction* (Vol. 150). IOS Press.

Mahan, A.T. (1890). *The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783*. Boston: Little, Brown and Company.

Mahan, A.T. (1892). *The Influence of Sea Power upon the French Revolution and Empire, 1793-1812*. Boston: Little, Brown and Company.

Mahan, A.T. (1897). *The Interest of America in Sea Power, Present and Future*. Boston: Little, Brown and Company.

Mahan, A.T. (1900). *The Problem of Asia and Its Effect Upon International Policies*. Boston: Little, Brown and Company.

Mahan, A.T. (1910). *The Interest of America in International Conditions*. Boston: Little, Brown and Company.

Mahan, A.T. (1911). *Naval Strategy: Compared and Contrasted with the Principles and Practice of Military Operations on Land*. Boston: Little, Brown and Company.

Marsetio. (2014). *Sea Power Indonesia*. Jakarta: Universitas Pertahanan.

PT PAL Indonesia. Dalam <https://www.pal.co.id/profile-perusahaan/> diakses Juli 2024

Roberts, C.B., Habir, A. D., & Sebastian, L. C. (Eds.). (2015). *Indonesia's ascent: Power, leadership, and the regional order* (p. 2). London: Palgrave Macmillan.

S.RAJARATNAM SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES (RSIS) REPORT OF A CONFERENCE ORGANISED. (2012). *Indonesia's Naval Development and Maritime Cooperation*.

S.RAJARATNAM SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES (RSIS) REPORT OF A CONFERENCE ORGANISED. (2011). *Naval Modernisation in Southeast Asia: Nature, Causes and Consequences*. [https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2014/07/ER110127\\_Naval\\_Modernisation\\_SEA.pdf](https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2014/07/ER110127_Naval_Modernisation_SEA.pdf) diakses Juli 2024

Sapanli, K., Kusumastanto, T., Budiharsono, S., & Sadelie, A. (2020). *Dinamika dan kebijakan pengembangan ekonomi kelautan Indonesia*. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 10(2), 117-128.

Schreer, B. (2013). *Moving Beyond Ambitions? Indonesia's Military Modernisation*. Canberra: Australian Strategic Policy Institute.

Sebastian, L.C., Supriyanto, R. A., & Arsana, I. M. A. (2015). *Beyond the archipelagic outlook: The law of the sea, maritime security and the great powers*. In *Indonesia's ascent: Power, leadership, and the regional order* (pp. 308-334). London: Palgrave Macmillan UK.

Shekhar, Vibhanshu and Joseph Chinyong Liow. (2014). *Indonesia as a Maritime Power: Jokowi's Vision, Strategies, and Obstacles Ahead* November 7, 2014. Dalam <https://www.brookings.edu/articles/indonesia-as-a-maritime-power-jokowis-vision-strategies-and-obstacles-ahead/> diakses 12 Juli 2024

SIPRI. (2021). *SIPRI Military Expenditure Database*. Stockholm: Stockholm International Peace Research Institute.

Sumida, J.T. (1997). *Inventing grand strategy and teaching command: the classic works of Alfred Thayer Mahan reconsidered*. Woodrow Wilson Center Press.

Supriyanto, R.A. (2012). *Indonesia's Naval Modernisation: A Sea Change?* RSIS Commentary, No. 020.

Susanto & Munaf, D. R. (2015). *Komando Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Suseto, B., Othman, Z., & Razalli, F. M. (2018). *The need to reform Indonesia's maritime strategy: A review*. *Indonesian Journal of Geography*, 50(2).

Till, G. (2013). *Seapower: A guide for the twenty-first century*. Routledge.

Till, G., & Chan, J. (Eds.). (2013). *Naval Modernisation in South-East Asia: Nature, Causes and Consequences*. Routledge.

Veron, J. E. N., Devantier, L. M., Turak, E., Green, A. L., Kininmonth, S., Stafford-Smith, M., & Peterson, N. (2009). Delineating the coral triangle. *Galaxea, Journal of Coral Reef Studies*, 11(2), 91-100.

Weatherbee, D. (2013). *Indonesia in ASEAN: vision and reality (Vol. 1)*. Institute of Southeast Asian Studies.

World Bank. (2021). *Military expenditure (% of GDP) - Indonesia*. Data retrieved from World Bank Open Data. Dalam <https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.X.PND.GD.ZS?locations=ID> diakses 12 Juli 2024